

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisisioner yang dibagikan kepada 100 responden yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lima samsat yang ada di DIY meliputi Samsat Bantul, Samsat Kulonprogo, Samsat Kota Jogja, Samsat Gunungkidul, dan Samsat Sleman. Jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 100 kuisisioner, 13 kuisisioner tidak kembali dan 12 kuisisioner tidak bisa diolah dikarenakan pengisian data tidak lengkap, sehingga jumlah kuisisioner yang dapat digunakan untuk analisis data pada penelitian ini sebanyak 75 kuisisioner. Pembagian kuisisioner dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016 sampai 20 Oktober 2016. Analisis pengembalian kuisisioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuisisioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jumlah kuisisioner yang dibagikan ke responden	100	100%
Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	13	13%
Jumlah kuisisioner yang diisi tidak lengkap	12	12%
Total kuisisioner yang dapat diolah	75	75%

Sumber: Data diolah, 2016

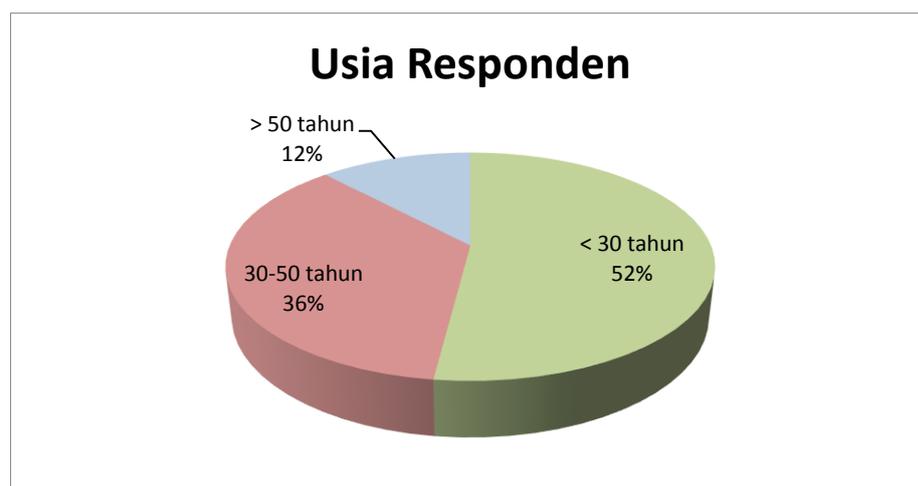
1. Demografi Obyek Penelitian

Obyek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor meliputi usia Wajib Pajak, jenis kelamin Wajib Pajak, pendidikan terakhir Wajib Pajak, dan pekerjaan Wajib Pajak.

a. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Usia

Grafik yang menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan usia Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia



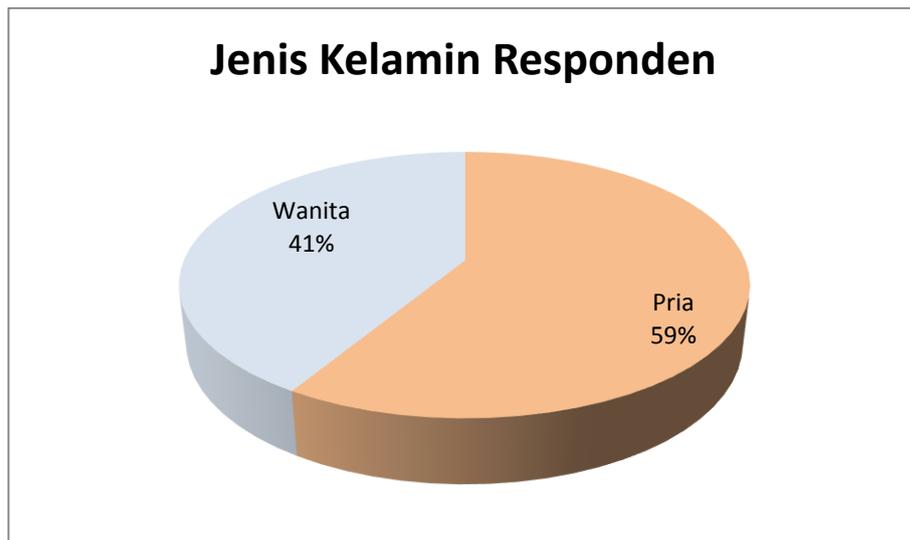
Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berusia kurang dari 30 tahun sebesar 52%, yang berusia antara 30-50 tahun sebesar 36% dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebesar 12%. Frekuensi responden paling banyak adalah responden yang berusia kurang dari 30 tahun yaitu sebesar 52% sedangkan frekuensi responden paling sedikit adalah responden yang berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebesar 12%.

b. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik yang menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



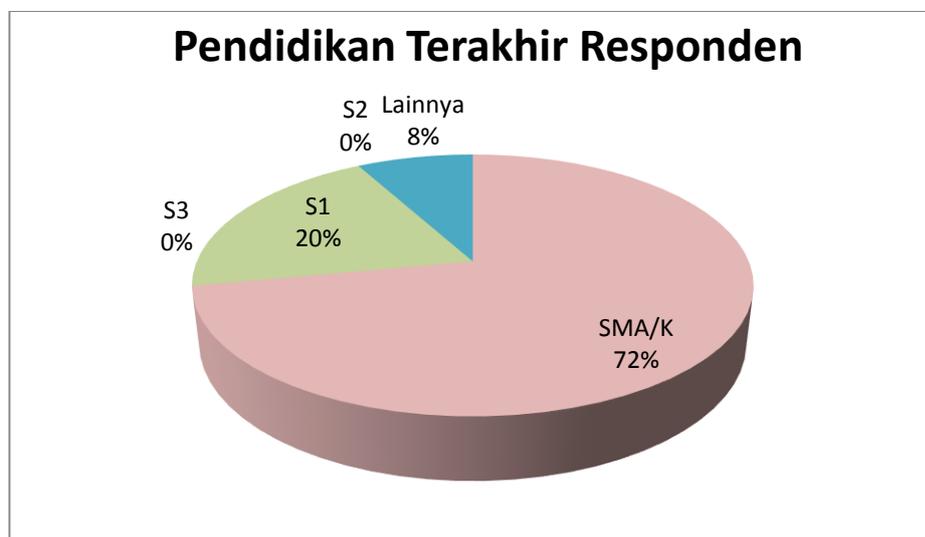
Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berjenis kelamin pria sebesar 59% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 41%. Frekuensi responden yang berjenis kelamin pria yaitu sebesar 59% lebih besar dibandingkan dengan frekuensi responden yang berjenis kelamin wanita yaitu sebesar 41%. Selisih frekuensi responden yang berjenis kelamin pria dengan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 18%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat dilakukan penelitian mayoritas berjenis kelamin pria.

c. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Grafik yang menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



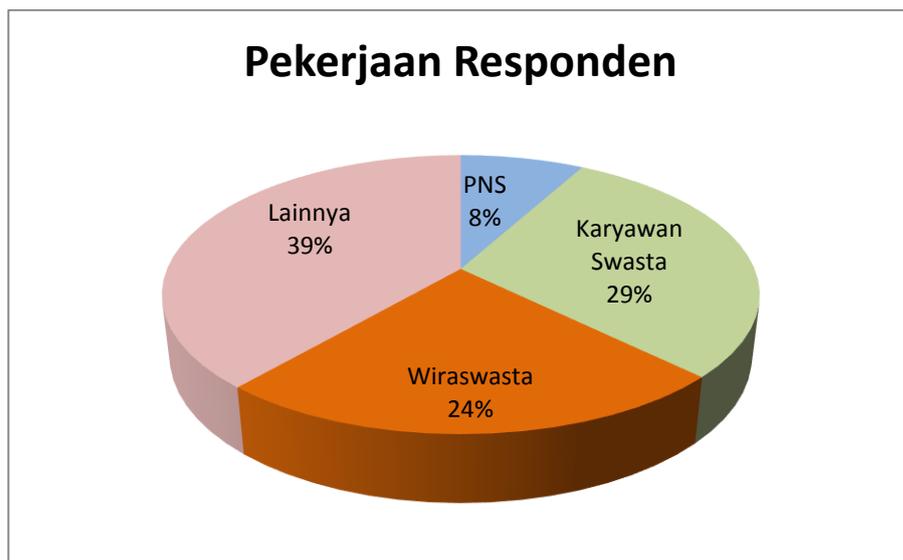
Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan pendidikan terakhir SMA/K sebesar 72%, S1 sebesar 20%, S2 dan S3 sebesar 0% atau tidak ada, dan Lainnya sebesar 8%. Frekuensi responden paling banyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA/K yaitu sebesar 72% sedangkan frekuensi responden paling sedikit adalah responden dengan pendidikan lainnya (selain SMA/K, S1, S2, dan S3) yaitu sebesar 8%. Tidak ada responden yang berpendidikan terakhir S2 dan S3.

d. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pekerjaan

Grafik yang menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang pekerjaannya PNS sebesar 8%, Wiraswasta 24%, Karyawan Swasta 29%, dan Lainnya (selain PNS, Wiraswasta, dan Karyawan Swasta) sebesar 39%. Frekuensi responden paling banyak adalah responden dengan pekerjaan Lainnya (selain PNS, Wiraswasta, dan Karyawan Swasta) yaitu sebesar 39% sedangkan frekuensi responden paling sedikit adalah responden dengan pekerjaan PNS yaitu sebesar 8%.

B. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	Sosialisasi Perpajakan (SOP)	Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	Sanksi Perpajakan (SAP)
Minimum	25	12	19	15	14
Maximum	40	25	30	30	25
Mean	36,05	20,39	26,45	25,84	20,69
Median	37,00	20,00	27,00	26,00	20,00
Std. Deviation	3,996	3,283	3,068	3,468	3,053
Percentil 25	32,00	19,00	24,00	24,00	19,00
Percentil 50	37,00	20,00	27,00	26,00	20,00
Percentil 75	40,00	23,00	29,00	30,00	23,00

Sumber: Data diolah, 2016

Dari hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 75 responden maka dapat ditunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP) memiliki nilai minimum responden sebesar 25 dan nilai maximum responden sebesar 40. Rata-rata total jawaban responden sebesar 36,05 berada di bawah angka median 37,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,996 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel sosialisasi perpajakan (SOP) memiliki nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maximum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20,39 berada di atas angka median 20,00 atau berada pada posisi di atas percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan di DIY sudah cukup tinggi. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,283 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel kesadaran wajib pajak (KSW) memiliki nilai minimum responden sebesar 19 dan nilai maximum responden sebesar 30. Rata-rata total jawaban sebesar 26,45 berada di bawah angka median 27,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,068 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel kualitas pelayanan fiskus (KPF) memiliki nilai minimum responden sebesar 15 dan nilai maximum responden sebesar 30. Rata-rata total jawaban responden sebesar 25,84 berada di bawah angka median 26,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,468 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel sanksi perpajakan (SAP) memiliki nilai minimum responden sebesar 14 dan nilai maximum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban

responden sebesar 20,69 berada di atas angka median 20,00 atau berada pada posisi di atas persentil 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan sudah cukup tinggi. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,053 lebih kecil dari nilai rata-rata.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Suatu instrumen penelitian harus dilakukan uji validitas agar alat ukur yang digunakan *valid* sehingga didapatkan hasil penelitian yang sebenarnya atau benar. *Valid* berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan *valid* apabila seluruh item pembentuk variabel memiliki kolerasi (r) dengan skor total masing-masing variabel $\geq 0,25$ (Nazarudin dan Basuki, 2016). Hasil uji validitas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Kolerasi	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP)	P1	0,668	<i>Valid</i>
	P2	0,660	<i>Valid</i>
	P3	0,814	<i>Valid</i>
	P4	0,739	<i>Valid</i>
	P5	0,827	<i>Valid</i>
	P6	0,775	<i>Valid</i>
	P7	0,751	<i>Valid</i>
	P8	0,790	<i>Valid</i>

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Kolerasi	Hasil
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	P9	0,803	<i>Valid</i>
	P10	0,810	<i>Valid</i>
	P11	0,898	<i>Valid</i>
	P12	0,776	<i>Valid</i>
	P13	0,865	<i>Valid</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	P14	0,806	<i>Valid</i>
	P15	0,789	<i>Valid</i>
	P16	0,775	<i>Valid</i>
	P17	0,776	<i>Valid</i>
	P18	0,693	<i>Valid</i>
	P19	0,778	<i>Valid</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	P20	0,672	<i>Valid</i>
	P21	0,743	<i>Valid</i>
	P22	0,760	<i>Valid</i>
	P23	0,704	<i>Valid</i>
	P24	0,859	<i>Valid</i>
	P25	0,855	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (SAP)	P26	0,734	<i>Valid</i>
	P27	0,805	<i>Valid</i>
	P28	0,847	<i>Valid</i>
	P29	0,861	<i>Valid</i>
	P30	0,862	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel hasil uji validitas dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 30 item memiliki total koefisien kolerasi $\geq 0,25$ sehingga telah memenuhi persyaratan uji validitas yaitu total koefisien kolerasi harus $\geq 0,25$, oleh karena itu, seluruh item instrumen penelitian dapat dinyatakan *valid*. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) yang baik adalah di atas 0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik) (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP)	0,884	<i>Reliabel</i>
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,885	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	0,857	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,860	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (SAP)	0,877	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel hasil pengujian reliabilitas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar 0,884, variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) 0,885, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW) 0,857, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) 0,860 dan variabel Sanksi Perpajakan (SAP) 0,887. Semua variabel pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,8 sehingga hasil pengujian reliabilitas dapat dinyatakan *reliabel* secara baik karena memenuhi syarat pengujian reliabilitas dengan angka > 0,8.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Dari hasil uji normalitas, jika nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov Test* lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov Test* lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji normalitas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>One Sample KS</i>	0,893	0,402	Data Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel hasil uji normalitas, dari 75 sampel yang dilakukan pengujian normalitas, nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov Test (Asymp Sig (2-tailed))* menunjukkan nilai $0,402 > 5\%$ atau $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas atau Kolinearitas Ganda (*Multicollinearity*) adalah adanya hubungan linear antara perubah bebas X dalam Model Regresi Ganda. Pendektasian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada tabel hasil pengujian multikolinearitas. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai $VIF < 10$ serta nilai *Tolerance* $> 0,1$ maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan sebaliknya (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji multikolinearitas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
SOP	0,524	1,908	Bebas Multikolinearitas
KSW	0,616	1,624	Bebas Multikolinearitas
KPF	0,501	1,996	Bebas Multikolinearitas
SAP	0,450	2,221	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel hasil uji multikolinearitas, variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) menunjukkan nilai Tolerance 0,524, variabel Kesadaran Wajib Pajak

(KSW) 0,616, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) 0,501 dan variabel Sanksi Perpajakan (SAP) 0,450. Nilai *tolerance* dari seluruh variabel $> 0,1$.

Selanjutnya nilai VIF pada variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan angka 1,908, Kesadaran Wajib Pajak 1,624, Kualitas Pelayanan Fiskus 1,996 dan Sanksi Perpajakan 2,221. Nilai VIF dari seluruh variabel menunjukkan angka < 10 .

Keseluruhan variabel menunjukkan nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai sig $> 0,05$ (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Sig	Keterangan
ABS_RES	SOP	0,376	Non Heteroskedastisitas
	KSW	0,515	Non Heteroskedastisitas
	KPF	0,429	Non Heteroskedastisitas
	SAP	0,841	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel uji heteroskedastisitas, nilai sig pada variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) menunjukkan angka 0,376, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW) 0,515, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) 0,429 dan variabel Sanksi Perpajakan (SAP) 0,841. Nilai sig pada masing-masing variabel independen menunjukkan angka $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Hasil pengujian regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	t	Sig	Keterangan
Konstanta	7,884		2,808	0,006	
SOP	-0,071	-0,59	-0,564	0,574	Tidak Signifikan
KSW	0,811	0,622	6,493	0,000	Signifikan
KPF	0,144	0,125	1,173	0,245	Tidak Signifikan
SAP	0,216	0,165	1,473	0,145	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 7,884 + -0,071 \text{ SOP} + 0,811 \text{ KSW} + 0,144 \text{ KPF} + 0,216 \text{ SAP} + e$$

Konstanta sebesar 7,884 menjelaskan bahwa nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (KWP) sebesar 7,884 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP).

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar $-0,071$, bertanda negatif dapat diartikan bahwa antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding terbalik, bila sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun sebesar $0,071$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,811$, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar $0,811$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar $0,144$, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila kualitas pelayanan fiskus mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar $0,144$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,216, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila sanksi perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar 0,216.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Besarnya persentase masing-masing variabel independen dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinan (*Adjusted R Square*). Besarnya koefisien determinan adalah antara 0 sampai 1, semakin besar koefisien determinasi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	R Square	Adjusted R Square
KWP	SOP, KSW, KPF, SAP	0,604	0,581

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel hasil uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,581, dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan

Sanksi Perpajakan (SAP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB sebesar 58,1%, sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2006). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan koefisien regresi bernilai negatif maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

Hasil uji t disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Keterangan
Konstanta	7,884	2,808	0,006	
SOP	-0,071	-0,564	0,574	Tidak Signifikan
KSW	0,811	6,493	0,000	Signifikan
KPF	0,144	1,173	0,245	Tidak Signifikan
SAP	0,216	1,473	0,145	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

1) Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,564 dengan nilai koefisien regresi $-0,071$ dan nilai sig variabel sosialisasi perpajakan $0,574 > \alpha 0,05$ maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,493 dengan koefisien regresi bernilai positif $0,811$ dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,000 < \alpha 0,05$ maka hipotesis kedua (H2) diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu pula sebaliknya.

3) Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,173 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,144 dan nilai sig variabel kualitas pelayanan fiskus $0,245 > \alpha 0,05$ maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

4) Sanksi Perpajakan (SAP)

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,473 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,216 dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,145 > \alpha 0,05$ maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

4. Uji F

Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan yang ditunjukkan dalam tabel ANOVA. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), kriteria pengujiannya adalah:

- a Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah terima hipotesis.
- b Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka keputusannya adalah tolak hipotesis.

Hasil uji F disajikan dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F

Variabel Dependen	Variabel Independen	F	Sig
KWP	SOP, KSW, KPF, SAP	26,702	0,000

Sumber: Data diolah, 2016

Dalam tabel hasil uji F dijelaskan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

F. Pembahasan (Interprestasi)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB dengan nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Suardana (2014) dan Ilhamsyah et al (2016) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di Kota Denpasar.

Variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikansi $0,574 > \alpha 0,05$ sehingga sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Penelitian dari Sundah dan

Toly (2014) dan Winerungan (2013) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kualitas pelayanan fiskus dengan nilai signifikansi $0,245 > \alpha 0,05$ sehingga kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini juga didukung penelitian dari Novitasari (2015) dan Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Variabel sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi $0,145 > \alpha 0,05$ sehingga sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Patmasari et al (2016) dan Samudra (2014) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada uji statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah. Dari rata-rata jawaban responden juga diperoleh data bahwa kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan fiskus masih rendah namun untuk sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan sudah cukup tinggi.

Dari hasil pengujian hipotesis serta uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY diduga disebabkan oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Apabila kesadaran wajib pajak masih rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY juga akan rendah begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya, kegiatan sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan di DIY sudah cukup tinggi, namun apabila keadaan ekonomi wajib pajak rendah atau terdapat faktor lainnya yang tidak mendukung maka tidak akan ada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor meskipun telah dilakukan sosialisasi maupun diberikan sanksi perpajakan secara tinggi.

Mengingat kualitas pelayanan fiskus masih rendah, diharapkan fiskus lebih mampu memperbaiki kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang akan berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dugaan bahwa apabila tidak didasari atas kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa diduga faktor sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tanpa didasari atas kesadaran pribadi wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.